

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
GAMPONG BATU SUMBANG KECAMATAN SIMPANG JERNIH
KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN PUBLIK ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Gelar Sarjana Program Studi
Ekonomi Syariah

Oleh:

SUKRIYADI
NIM. 4022020070



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUD AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AJARAN 2024**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT
GAMPONG BATU SUMBANG KECAMATAN SIMPANG JERNIH
KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN PUBLIK ISLAM**

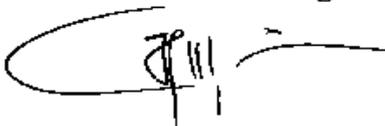
Oleh :

SUKRIYADI
NIM. 4022020070

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 13 Januari 2025

Pembimbing I



Nurjanah, M.E

NIP. 19880626 201908 2 001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec

NIP.19770808 202321 1 009

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Chahayu Astina, S.E, M.Si

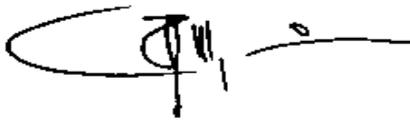
NIP. 19841123 201903 2 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam" an SUKRIYADI Nim: 4022020070 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 14 Februari 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I



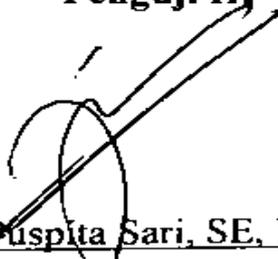
Nurjanah, M.E
NIP. 19880626 201908 2 001

Penguji II



Dr. Muhammad Dayvan, M.Ec
NIP. 19770808 202321 1 009

Penguji III



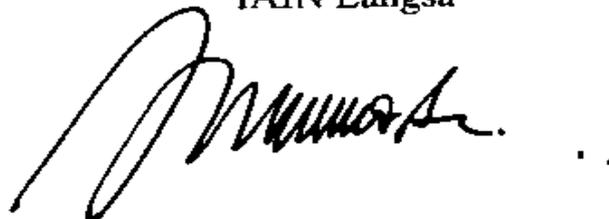
Juli Dwina Puspita Sari, SE, Mbus (ADV)
NIP. 19870706 201903 2 012

Penguji IV



Zulfa Eliza, S.E., M.SI
NIP. 19850403 202321 2 043

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : SUKRIYADI

Nim : 4022020070

Tempat / Tgl. Lahir :

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa

Alamat :

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul "Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 13 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



SUKRIYADI
NIM. 4022020070

MOTTO

*“ Letakan aku dalam hatimu, maka aku pun akan
meletakkanmu dalam hatiku ”*

(Qs. Al-Baqarah:152)

“ Jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu hasilnya”

“Maka”

“Jika ingin beruntung lalui dulu bahagiannya”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa hormat dan syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan segala doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya. Tanpa bimbingan dan cinta kalian, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkah untuk kalian berdua. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan, semoga dapat membalasnya dengan sebaik-baiknya.

Aamiin.

Abstrak

Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebajikan, kehendak bebas, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi melalui pengeluaran dan pengelolaan keuangan yang efektif, seperti yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang, mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif kebijakan publik Islam, dan mengidentifikasi dampak kebijakan yang dilakukan. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian yang terdiri dari aparatur Gampong, masyarakat, serta ahli kebijakan publik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang yaitu dengan melakukan pemberian bantuan bibit unggul, pemberdayaan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dibidang kesehatan seperti program *stunting*, posyandu lansia dan pelayanan fasilitas polindes serta pembangunan infrastruktur ekonomi, telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Kebijakan ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan distribusi hasil pertanian. Namun, terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kerusakan fasilitas air bersih dan irigasi serta terbatasnya akses jalan pada musim hujan yang menghambat kegiatan pertanian. Kebijakan pembangunan ekonomi di Gampong Batu Sumbang mencerminkan prinsip kebijakan publik Islam, seperti keadilan, kebajikan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Prinsip keadilan terwujud dalam bantuan yang sesuai kebutuhan, kebajikan melalui penyediaan air bersih, irigasi, dan program kesehatan, kehendak bebas diwujudkan dalam musyawarah desa, dan tanggung jawab tercermin dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur dan penguatan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan manfaat kebijakan.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Masyarakat, Kebijakan Publik Islam.

ABSTRACT

From an Islamic perspective, public policy must reflect the values of justice, virtue, free will, and social responsibility. The government has an important role in creating economic development through effective spending and financial management, as manifested in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and Village Funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The purpose of this study was to determine the implementation of community economic development policies in Gampong Batu Sumbang, to examine these policies from the perspective of Islamic public policy, and to identify the impacts of the policies implemented. This research method is field research with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with research subjects consisting of Gampong officials, the community, and Islamic public policy experts. The results of the study indicate that the policies implemented in Gampong Batu Sumbang, namely by providing assistance for superior seeds, empowering human resources, fulfilling health needs such as stunting programs, elderly posyandu and polindes facility services, and developing economic infrastructure, have had a positive impact on community welfare, especially in the agricultural and plantation sectors. This policy has succeeded in increasing agricultural productivity and distribution of agricultural products. However, there are obstacles in its implementation, such as damage to clean water and irrigation facilities and limited road access during the rainy season which hampers agricultural activities. The economic development policy in Gampong Batu Sumbang reflects the principles of Islamic public policy, such as justice, virtue, free will, and responsibility. The principle of justice is manifested in assistance according to needs, virtue through the provision of clean water, irrigation, and health programs, free will is manifested in village deliberations, and responsibility is reflected in efforts to meet the basic needs of the community. The implications of this study indicate the need for infrastructure improvements and strengthening community participation to ensure the sustainability of policy benefits.

Keywords: Economic Development, Society, Islamic Public Policy..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menulis Skripsi yang berjudul, “**Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam**” dengan baik. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Chahayu Astina, S.E., M.SI, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Nurjanah, M.E, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan fikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I, selaku Kepala Labolaturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah banyak memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staf TU Prodi Ekonomi Syariah dan Staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta terkhusus Ibunda -----dan Ayahanda -----yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik pada prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan yang baik moril maupun materil pada peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu mohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan ini. Akhir kata, kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, 13 Januari 2025
Peneliti

SUKRIYADI
NIM. 4022020070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.6 Penjelasan Istilah	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Kebijakan Publik Islam	18
2.1.1 Pengertian Kebijakan	18
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	19
2.1.3 Bentuk dan Analisis Kebijakan Publik	20
2.1.4 Implementasi Kebijakan	22
2.1.5 Kebijakan Publik dalam Islam	24
2.2 Pembangunan Ekonomi	28
2.2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi	28
2.2.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi	30
2.2.3 Manfaat Pembangunan Ekonomi	31
2.2.4 Indikator Pembangunan Ekonomi.....	32
2.2.5 Pembangunan Ekonomi Dalam Islam.....	34
2.3 Pembangunan Desa.....	37
2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa.....	37
2.3.2 Faktor Pendorong Pembangunan Ekonomi Desa	39
2.3.3 Tujuan Pembangunan Ekonomi Desa	40
2.4 Penelitian Terdahulu	41
2.5 Kerangka Teori	48

BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.3 Subjek Penelitian	50
3.4 Sumber Data Penelitian	51
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	52
3.6 Metode Keabsahan Data	53
3.7 Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Gambaran Umum	59
4.1.1 Sejarah Gampong Batu Sumbang	59
4.1.2 Lokasi Gampong Batu Sumbang	59
4.1.4 Keadaan Penduduk Gampong Batu Sumbang.....	60
4.1.4 Visi Dan Misi Gampong Batu Sumbang	60
4.1.5 Struktur Organisasi	61
4.2. Pembahasan	62
4.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur.....	64
4.2.2 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur Perspektif Kebijakan Publik Islam.....	77
4.2.3 Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur Perspektif Kebijakan Publik Islam	89
4.3 Pembahasan	93
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
Lampiran I: Draft Pertanyaan Wawancara.....	109
Lampiran II: Dokumentasi	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya ditunjukkan untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.¹

Sejalan dengan itu, pembangunan daerah memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, penciptaan kesempatan kerja, dan perluasan lapangan usaha. Selain itu, pembangunan daerah juga berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong daya saing daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Semua ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.²

¹ Muhammad Idris Patarai. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. (Makassar: De La Macca, 2016), h. 262.

² Krisnawati. "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 2.2* (2016), h. 138.

Dalam konteks pembangunan yang lebih kecil, desa menjadi bagian penting dari tatanan ini. Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil, telah berkembang seiring perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan memiliki peran vital dalam struktur kehidupan nasional. Untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa sebagai subyek pembangunan, Negara mengakui pentingnya desa dalam pembangunan melalui kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan dalam penataan desa, sekaligus memberdayakan masyarakat desa agar mampu berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.³

Di dalam Undang-Undang tentang Desa, terdapat 7 (tujuh) sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, salah satunya adalah anggaran dari APBN yang tercantum pada pasal 72 ayat (1). Pemerintah pusat memberikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴ Dana Desa juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan

³ Maghfiroh, Durrotul, Dwi Risma Deviyanti, and Indra Suyoto Kurniawan. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 4.3 (2019), h. 2

⁴ Icuik Ranga Bawano dan Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019), h. 46

masyarakat, dan pembinaan masyarakat.⁵ Secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Salah satu permasalahan dalam pembangunan di Indonesia adalah ketimpangan pembangunan Kota dan Desa yang sudah berlangsung sekian lama. Sebagian besar pusat-pusat aktivitas ekonomi berada di daerah perkotaan sehingga lebih menarik bagi sebagian besar penduduk untuk tinggal dan mencari pekerjaan di kota sehingga desa mengalami kekurangan tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian di desa. Secara umum, hampir di seluruh wilayah di Indonesia, penduduk miskin pedesaan memiliki jumlah dan persentase yang lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mayoritas berada di wilayah perdesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu integrasi antara perekonomian desa dengan kota sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.⁶

Oleh karena itu, untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di Pedesaan, maka pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas bagi desa untuk menjadi lebih mandiri dalam hal tata kelola pembangunan desa

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

⁶ Mujiwardhani, Alfian, Heru Wibowo, and Iman Tri Mulya. "Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 1.2 (2019), h. 164-165.

dan tata kelola keuangan desa. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa. Selain itu, dengan memajukan perekonomian desa, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pagu Dana Desa tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 70 triliun dan dialokasikan kepada 75.265 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini naik sebesar Rp 2 triliun dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp 468,6 triliun sejak tahun 2015. Berikut besaran dana desa yang ada di Provinsi Aceh tahun 2021-2023.

Tabel 1.1
Dana Transfer ke Daerah Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran Dana Transfer Provinsi Se-Aceh	Anggaran Dana Transfer Kab. Aceh Timur
2021	4.986.622.282	387.787.938
2022	32.478.461.667	1.463.684.367
2023	29.764.463.098	1.490.398.377

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id. 2023.

Pada tahun 2021, Provinsi Aceh menerima anggaran Dana Transfer sebesar Rp. 4.986.622.282, dengan Kabupaten Aceh Timur mendapatkan bagian sebesar Rp. 387.787.938. Pada tahun ini, dana yang diterima relatif lebih kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, anggaran Dana Transfer untuk Provinsi Aceh meningkat signifikan menjadi Rp. 32.478.461.667,

sementara Kabupaten Aceh Timur menerima Rp. 1.463.684.367. Lonjakan besar dalam anggaran ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kebutuhan pembangunan, respons terhadap keadaan darurat, atau peningkatan alokasi dari pemerintah pusat berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Provinsi Aceh mendapatkan anggaran Dana Transfer sebesar Rp. 29.764.463.098, dengan Kabupaten Aceh Timur menerima Rp. 1.490.398.377. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022, anggaran untuk tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Ini menunjukkan adanya konsistensi dalam alokasi dana yang cukup besar untuk Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Timur, yang kemungkinan digunakan untuk melanjutkan proyek-proyek yang sudah berjalan dan memperkenalkan inisiatif baru yang mendukung pembangunan daerah. Setiap tahun, jumlah dana yang diterima oleh Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Timur mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Penggunaan dana ini diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Batu Sumbang merupakan salah satu Gampong yang berada di daerah Kec. Simpang jernih Kabupaten Aceh Timur. yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat indah dan dapat menarik para wisatawan untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Dengan pemandangan alam yang memukau, air sungai yang eksotis, serta hutan yang masih asri, Gampong ini memiliki segala daya tarik untuk dikembangkan menjadi pusat pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata. Potensi tersebut, jika

dikelola dengan baik, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Gampong Batu Sumbang juga cukup banyak, meliputi pertanian, peternakan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, industri kerajinan, perkebunan, perikanan, hortikultura, dan lain-lain. Gampong Batu Sumbang memiliki sumber daya alam dan sektor-sektor yang dapat diberdayakan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Namun demikian, saat ini Gampong Batu Sumbang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, kondisi perekonomian daerah yang belum optimal, pemanfaatan sumber daya alam yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan dan infrastruktur yang masih belum memadai. Padahal dengan potensi-potensi yang dimiliki, Gampong Batu Sumbang seharusnya dapat menjadi salah satu sentra pertumbuhan ekonomi di kawasan Aceh Timur dikarenakan sumber daya alam yang melimpah.⁸

Di Desa Batu Sumbang, meskipun alokasi dana desa telah berjalan selama beberapa tahun, hasilnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. Banyak proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu dan tidak memenuhi standar kualitas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Kurangnya optimalisasi ini menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti terbatasnya aksesibilitas ke pusat kegiatan ekonomi, rendahnya kualitas hidup, dan kurangnya peluang kerja bagi

⁷ Hasil Observasi Awal pada Tanggal 11 November 2024.

⁸ Hasil Observasi Awal pada Tanggal 11 November 2024.

penduduk Gampong Batu Sumbang. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa meskipun dana tersedia, pemanfaatannya belum memberikan dampak yang diharapkan. Permasalahan ini mencerminkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran desa untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki keadaan suatu kaumnya pada Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri*".

Dalam Tafsir Al-Azhar, ayat ini ditafsirkan sebagai ayat yang menegaskan kekuatan serta akal budi yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan anugerah tersebut, manusia mampu bertindak dan mengendalikan dirinya sendiri, namun tetap di bawah naungan dan petunjuk Allah. Allah memberi manusia kemampuan untuk bertanggung jawab atas hidupnya, dan karena itu, manusia wajib berusaha menentukan arah hidupnya, tidak hanya menyerah tanpa usaha. Akal yang diberikan oleh Allah memungkinkan manusia untuk mempertimbangkan dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Manusia tidaklah seperti kapas yang diterbangkan angin tanpa arah, atau seperti batu yang terlempar di tepi jalan. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan berpikir dan tenaga untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, tentu dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Oleh

sebab itulah manusia diberi kehormatan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang memikul tanggung jawab besar dalam kehidupan⁹.

Al-Qur'an mengakui manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai perwakilan atau duta Allah yang bertugas untuk mengelola dunia demi kepentingan kehidupan. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, manusia dituntut untuk aktif dan kreatif, menggunakan akal dan kemampuannya dengan bijak. Pengakuan ini memberikan manusia hak otonomi, namun tetap dalam batas-batas tertentu sesuai dengan tugasnya sebagai duta dan pelaksana amanah dari Allah. Manusia diharapkan memegang peran ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Sejalan dengan peran sebagai khalifah, pembangunan merupakan proses yang vital untuk mewujudkan cita-cita negara dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, hingga saat ini, manfaat dari pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryani dan Agus Eka, pembangunan yang baik harus diawali dengan perencanaan yang matang, sehingga dapat dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang ada di desa. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan setiap daerah dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warganya.¹⁰ Penelitian terdahulu

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, Cet. 1, (Jakarta; Gema Insani, 2015), h. 54.

¹⁰ A'an, Sri Maryani, and Agus Eka. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas." *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 3.1 (2022). h. 2

mengenai kebijakan dana desa telah dilakukan oleh Sari dimana menemukan bahwa dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan, memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan.¹¹

Dalam 5 tahun terakhir, Pembangunan infrastruktur jalan di Gampong Batu Sumbang masih belum terealisasi secara optimal. Meskipun ada beberapa proyek jalan yang telah dikerjakan, banyak di antaranya masih dalam kondisi kurang baik seperti jalan tanah dan kerikil yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hanya sebagian kecil jalan yang sudah diaspal, dan bahkan beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti berlubang dan retak. Hal ini menghambat aksesibilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Sistem irigasi yang memadai sangat penting untuk mendukung sektor pertanian di Gampong Batu Sumbang. Namun, proyek irigasi yang sudah direncanakan banyak yang belum selesai, menyebabkan para petani kesulitan dalam mengelola air untuk sawah dan ladang mereka. Kurangnya infrastruktur irigasi yang baik berakibat pada rendahnya produktivitas dan hasil panen. Program pemberdayaan masyarakat di Gampong Batu Sumbang masih kurang optimal dalam meningkatkan keterampilan dan pendapatan penduduk lokal. Meskipun ada beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan, dampaknya belum signifikan. Banyak program yang tidak berkelanjutan dan kurang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi lokal.¹²

¹¹ Muhammad Faisal Nofian. "Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016." *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 1.2 (2018), h. 350.

¹² Hasil Observasi Awal pada Tanggal 11 November 2024.

Keberhasilan suatu kebijakan dalam bentuk program maupun kegiatan pada dasarnya sangat tergantung dari sejauh mana efektivitas dari kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Batu Sumbang dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami penyebab kurang optimalnya pemanfaatan dana desa, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berfokus pada perbaikan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan strategi pengawasan yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan pihak terkait dalam mengelola anggaran dengan lebih efektif, sehingga pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Desa Batu Sumbang dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi masyarakat dengan judul penelitian **“Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dana desa yang telah dialokasikan belum memberikan dampak signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. Proyek infrastruktur sering tidak selesai tepat waktu dan tidak memenuhi standar kualitas.

2. Infrastruktur jalan dan irigasi di Gampong Batu Sumbang masih belum memadai, menghambat aktivitas ekonomi dan produktivitas pertanian.
3. Program pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal dalam meningkatkan keterampilan dan pendapatan penduduk lokal, dengan banyak program yang tidak berkelanjutan dan kurang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi lokal.

1.3 Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik, maka peneliti akan membuat batasan penelitian atau batasan masalah. Adapun batasan masalah yang diteliti lebih lanjut tentang analisis kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat yang terkait dengan pengelolaan dana desa dan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif kebijakan publik Islam, terutama dalam mendukung perbaikan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang, Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur perspektif kebijakan publik Islam?

3. Bagaimana Dampak kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur perspektif kebijakan publik Islam.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penerapan kebijakan

pembangunan ekonomi masyarakat Gampong Batu Sumbang dalam prespektif pembangunan ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi pemerintah gampong Batu Sumbang

Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai perangkat Gampong, meningkatkan kualitas kinerja serta meningkatkan transparansi pemerintah desa.

b. Bagi Masyarakat Gampong Batu Sumbang

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat Gampong Batu Sumbang agar mengetahui peranan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

c. Manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur

Sebagai pengetahuan dan acuan untuk desa lain agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan desa sehingga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

d. Manfaat bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan serta pertimbangan penelitian terutama dibidang pembangunan ekonomi, sebagai pengetahuan baru tentang pentingnya pembangunan ekonomi masyarakat desa, dan sebagai masukan untuk menambah wawasan.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup segala tindakan yang diumumkan dan dilaksanakan, atau bahkan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan publik juga mencakup kebijakan yang diformulasikan atau diputuskan oleh instansi-instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan publik, perubahan tersebut dilakukan lebih bersifat tambal sulam dibandingkan dari pada bersifat revolusioner. Dalam bentuknya yang realistis kebijakan publik sering kali hanya disempurnakan dan jarang dilakukan pergantian.¹³

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi ialah proses meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dalam jangka yang panjang yang ditandai dengan beberapa perubahan seperti perubahan teknologi maupun perubahan pada pola pikir masyarakat. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan meningkatnya pendapatan secara total serta pendapatan per kapita dengan memperhitungkan jumlah penduduk.¹⁴

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, arah serta tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk mensejahterakan hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam melakukan pengelolaan sumber

¹³ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), h. 130.

¹⁴ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*. (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 1-2.

daya ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan ekonomi secara berkelanjutan membutuhkan sumber daya yang sangat banyak, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kelembagaan serta sumber daya modal. Sumber daya ekonomi yang melimpah menjadi pemacu sebuah negara dalam meningkatkan pembangunan ekonomi guna tercapainya kemakmuran serta kemandirian ekonomi di suatu negara. Selain beberapa sumber daya yang telah dijelaskan terdapat hal penting yang dibutuhkan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi, yaitu kemajuan teknologi.¹⁵

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu bagian dari program pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam implementasinya di era orde baru peranan pemerintah sangat dominan sebagai pelaksana pembangunan desa. Namun dalam perkembangannya di era reformasi, maka sebagai unsur pemerintah telah mengalami perubahan dalam melakukan tugas dan fungsinya, dari posisi pelaksana menjadi fasilitator pembangunan desa. Masyarakat desa ditempatkan selaku subyek dan obyek pembangunan desa. Proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat desa adalah merupakan bentuk sinergi yang dapat menciptakan akselerasi

¹⁵ Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*, (Malang: Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), h. 3.

pembangunan desa, dengan menempatkan masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa.¹⁶

4. Kebijakan Publik dalam Islam

Kebijakan Publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar maqashid shari'ah dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam.¹⁷

1.7 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka penelitian skripsi menyusun ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berkaitan satu sama lain, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan dasar penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

¹⁶ Alfiaturrahman, Pislawati. "Perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan." *Valuta* 2.2 (2016), h.251.

¹⁷ Muhammad Syahbudi, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Cet.Ke-1. (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), h. 49.

Menguraikan tentang kajian teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian yaitu: Kebijakan Publik, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi dalam Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, metode keabsahan data, dan analisis hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang gambaran umum Gampong Batu Sumbang, Kec. Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan kebijakan di Gampong Batu Sumbang berdasarkan pembangunan ekonomi masyarakat sesuai dengan kebijakan pembangunan dalam Islam.

BAB V HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Gampong Batu Sumbang

Kisah sepasang saudara kandung, dimana pada saat sepasang abang beradik mau pergi memancing kesungai menggunakan sampan. Pada saat itu abangnya nekat mau berbuat jahat kepada sang adiknya, sang adik berontak tidak mau sehingga sampan yang ditumpangi telungkup hingga jadi lah Batu, Perbuatan jahat sang abang di sebut Sumbang, jadi lah disebut Batu Sumbang.

4.1.2 Lokasi Gampong Batu Sumbang

Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari 8 Gampong. Gampong yang terdapat di Kecamatan Simpang Jernih salah satunya adalah Gampong Batu Sumbang. Kecamatan Simpang Jernih yang terletak pada posisi geografis $04^{\circ}42'17,57''-04^{\circ}45'35,14''$ lintang utara $97^{\circ}49'35,13''-97^{\circ}58'26,48''$ bujur timur, termasuk ke dalam wilayah Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Gampong Batu Sumbang terdiri dari 2 dusun yaitu dusun titi dan dusun ingin jaya. Luas wilayah Gampong Batu Sumbang sekitar 75.00 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Gampong Pante Kera
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Melidi
3. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Melidi
4. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Simpang Jernih

Gampong Batu sumbang terletak + 1 km dari Kecamatan Simpang Jernih atau sekitar 10 menit perjalanan dengan kendaran roda dua atau roda empat. Perhubungan antar kampung di dalam desa kurang baik, ada beberapa desa yang kondisi jalannya kurang baik sert belum mendapatkan akses jalan darat sehingga untuk datang ke Gampong tersebut harus melalui sungai.

4.1.3 Keadaan Penduduk Gampong Batu Sumbang

Gampong Batu Sumbang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 432 jiwa, dengan perbandingan antara pria dan wanita masing-masing orang 221 orang laki-laki dan 211 orang perempuan. Penduduk yang terdapat di desa Gampong sumbang adalah Warga Negara Indonesia asli.

4.1.4 Visi Dan Misi Gampong Batu Sumbang

VISI

Terwujudnya aparatur pemerintahan gampong dan pembangunan yang bersih, sehat dan nyaman menuju gampong gemilang dalam bingkai syariat islam

MISI

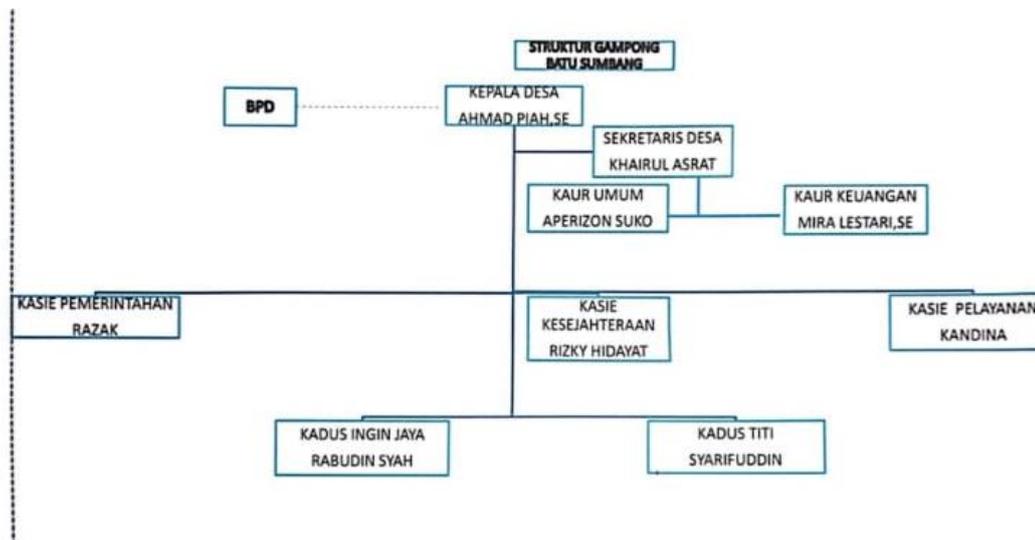
1. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan dan warga gampong melalui pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan, pembangunan, kesehatan, dan anggaran/ekonomi yang berbasis ilmu teknologi (IT) atau komputerisasi.
2. Mendukung upaya dan program serta kebijaksanaan pemerintah desa batu sumbang dalam meningkatkan kesejahteraan dalam menuntaskan kemiskinan warga serta pembangunan yang berkesinambungan

3. Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap warga Baik secara individu atau kelompok. Dengan segera dan tuntas bagi yang membutuhkan.
4. Menerapkan seluruh aparatur pemerintahan gampong untuk menjalankan syariat islam secara utuh, dengan prinsip kekeluargaan dalam bekerja dan bersikap santun dalam setiap menyelesaikan masalah.
5. Mensosialisasikan mamfaat dan taat terhadap hokum serta peraturan-peraturan pemerintah, kepada warga gampong secara berjenjang dan berskala.

MOTTO

Bekerja Ikhlas Dan Santun Menebar Senyum, Sapa dan Salam

4.1.5 Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

Kebijakan pembangunan ekonomi lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi berbagai tantangan ekonomi, terutama di tingkat lokal. Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, kebijakan yang diterapkan biasanya berlandaskan pada regulasi yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan desa. Keberadaan peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi agar berjalan secara sistematis, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang mengatur, pembangunan ekonomi dapat lebih terarah serta memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kebijakan pembangunan ekonomi desa diatur dalam berbagai peraturan yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat setempat. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola sumber daya dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dalam undang-undang ini, desa berhak mengelola Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.⁶⁹

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pedoman dalam pengelolaan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. BUMDes bertujuan untuk mengelola usaha desa secara mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan asli desa.⁷⁰ Dalam implementasinya, desa juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur teknis pelaksanaan pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 mengarahkan penggunaan Dana Desa agar lebih efektif dalam mendorong sektor ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta ekonomi kreatif berbasis komunitas.⁷¹ Untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas kebijakan ekonomi.

Dengan adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, kebijakan pembangunan ekonomi desa diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan perlu disertai dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang ketat, agar dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

⁷¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

4.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur

Pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang bertujuan utama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui upaya pemberdayaan potensi lokal yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kebijakan ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, tetapi juga untuk membuka peluang baru yang berkelanjutan guna menciptakan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku geuchik Gampong batu Sumbang Sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan yang kami lakukan di gampong Batu sumbang dirancang dan dilihat dari kebutuhan masyarakatnya. Melalui pemberdayaan potensi lokal yang ada di Gampong Batu Sumbang sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat”.⁷²

Keberlanjutan ekonomi menjadi landasan terakhir yang mendasari pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memanfaatkan potensi lokal secara bijaksana, seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga kerajinan tangan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam. Pemerintah dan masyarakat di Gampong Batu Sumbang bekerja sama untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong Batu Sumbang, pada tanggal 6 November 2024.

positif jangka panjang bagi generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, sebagai berikut:

“Pada pembangunan sektor lokal, dikarenakan masyarakat Gampong Batu Sumbang mayoritas sebagai petani dan pekebun. Kebijakan pembangunan yang kami fokuskan yaitu dari pemberdayaan sumber daya manusia-nya dan juga pemenuhan kebutuhan bagi para petani dan pekebun dalam mendukung perekonomian masyarakat Gampong Batu Sumbang. Pemerintah gampong dan masyarakat juga bekerja sama dalam menentukan kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan”.⁷³

Adapun kebijakan yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong Batu Sumbang diantaranya sebagai berikut:

1. Kesehatan

Pemerintah gampong Batu Sumbang untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam perihal menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satu kebijakan yang dibuat yaitu membuat program *stunting* bagi balita dan ibu hamil dan juga posyandu bagi lansia serta penyediaan fasilitas polindes. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geuchik Gampong Batu Sumbang, sebagai berikut:

“Program *stunting* untuk balita dan ibu hamil di Gampong Batu Sumbang menjadi salah satu prioritas kami. Karena kesehatan anak-anak dan ibu hamil adalah fondasi penting untuk perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kami menjalankan program *stunting* ini untuk memastikan setiap balita tumbuh dengan baik, serta ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kami bekerja sama dengan tenaga

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

kesehatan untuk memantau dan memberikan edukasi terkait gizi yang tepat bagi ibu dan anak'.⁷⁴

Adapun lanjutan hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang, sebagai berikut:

“Dalam memberikan kesehatan yang memadai bagi lansia, kami juga melakukan pengadaan posyandu untuk lansia. Kami berharap Posyandu yang kami lakukan tidak hanya meningkatkan kesehatan lansia tetapi juga menjadi tempat bagi lansia untuk berkumpul, berinteraksi dan juga mendapatkan informasi mengenai cara menjaga kesehatan mereka di lanjut usia”.⁷⁵

Hal ini juga mendapat tanggapan dari Bapak Rizki Hidayat, mengenai kebijakan dalam kesehatan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sebagai upaya untuk mendukung program kesehatan masyarakat, kami juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa polindes. Polindes ini akan memberikan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan balita, serta pertolongan persalinan yang aman”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Gampong Batu Sumbang dalam hal pembangunan sumber daya manusia mengenai peningkatan perekonomian masyarakat Gampong batu sumbang dengan melakukan kebijakan melalui bidang kesehatan yaitu, membuat program stunting bagi balita dan ibu hamil agar dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan membuat program lansia dan juga fasilitas kesehatan di gampong batu sumbang. Melalui

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong Batu Sumbang, pada tanggal 6 November 2024.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang, pada tanggal 6 November 2024.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

kebijakan-kebijakan ini, gampong batu sumbang berupaya membangun masyarakat yang sehat dan produktif sebagai dasar untuk kemajuan ekonomi di Gampong Batu Sumbang.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah gampong bersama masyarakat melakukan identifikasi potensi ekonomi yang dimiliki, seperti sektor pertanian dan perkebunan. Wilayah ini dikenal dengan hasil alam seperti padi, karet, sawit dan tanaman pangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Adapun kebijakan yang dibuat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan pembagian bibit unggul, pembuatan kelompok tani sehingga dapat menciptakan peningkatan hasil panen dari masyarakat Gampong Batu Sumbang, selain dari pemberdayaan sektor pertanian pemerintah gampong juga membuat program pembentukan kampung wisata. Adapun hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong batu sumbang sebagai berikut:

“Dalam pemberdayaan masyarakat di gampong Batu sumbang Kami telah melakukan beberapa langkah untuk mendukung sektor pertanian, di antaranya adalah mengusulkan bantuan bibit unggul bersubsidi melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur. Selain itu, kami juga membentuk kelompok tani agar dapat memberikan peningkatan hasil panen. Selain dari sektor pertanian, kami juga sedang menjalankan program pembentukan kampung wisata yang bertujuan untuk membuka peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat”.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong Batu Sumbang, pada tanggal 6 November 2024.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku

Kase Kesejahteraan Gampong Batu sumbang sebagai berikut:

“Kami berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan akses kepada bantuan bibit unggul bersubsidi. Selain itu, kami bekerja sama dengan pihak kabupaten untuk menyelenggarakan pelatihan bagi petani, seperti cara mengelola lahan agar lebih produktif dan teknik bertani modern. Tidak hanya itu, kami juga mendampingi petani untuk membentuk kelompok tani agar mereka bisa saling membantu dan lebih mudah mengakses bantuan”.⁷⁸

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut

Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Gampong kita ini sangat kaya dengan hasil alam. Tanahnya subur, dan hasil seperti padi, sawit, karet, serta tumbuhan pangan sangat melimpah. Namun, kita perlu dukungan lebih besar dari pemerintah, terutama dalam bentuk bantuan bibit unggul agar dapat meningkatkan pendapatan para petani”.⁷⁹

Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal di sektor pertanian dan perkebunan serta sumber daya alam yang ada di Gampong Batu Sumbang. Pemerintah gampong bersama masyarakat telah melakukan identifikasi potensi ekonomi yang dimiliki, seperti hasil alam berupa padi, karet, sawit, dan tanaman pangan. Upaya tersebut disertai dengan pengusulan bantuan bibit unggul bersubsidi melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur, serta pembentukan kelompok tani dan pembentukan kampung wisata. Oleh karena itu, meski kebijakan yang ada sudah berjalan dengan baik, dukungan lebih besar dari pemerintah sangat

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

diperlukan untuk memaksimalkan potensi lokal dan meningkatkan pendapatan pertanian dan perkebunan masyarakat Gampong Batu Sumbang. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku masyarakat Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah gampong sangat membantu kami, para petani. Kami sudah mendapatkan bantuan bibit unggul bersubsidi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, adanya pelatihan pertanian yang diadakan dalam kelompok tani juga sangat bermanfaat karena kami jadi tahu cara bertani yang lebih efisien dan menggunakan teknologi yang lebih modern. Namun, yang masih kami harapkan adalah adanya dukungan lebih lanjut dalam hal pemberian pupuk dari pemerintah agar dapat meningkatkan hasil panen bagi para petani.⁸⁰

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Bapak Darmawi, yaitu:

“Selama ini, saya merasa kebijakan dari pemerintah gampong sangat mendukung sektor pertanian dan perkebunan kami. Kami mendapat bantuan bibit bersubsidi yang memang sangat kami butuhkan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas sehingga hasilnya juga berkualitas”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Batu Sumbang menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah gampong telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat mengapresiasi bantuan yang diberikan, seperti bibit unggul bersubsidi yang sangat membantu dalam meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Selain itu, program pelatihan yang diadakan juga dianggap bermanfaat, karena memberikan pengetahuan baru bagi petani dalam

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Masyarakat Gampong Batu Sumbang, pada tanggal 8 November 2024.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Darmawi selaku Masyarakat Gampong Batu Sumbang, pada tanggal 8 November 2024.

mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara yang lebih efisien.

3. Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Infrastruktur penunjang ekonomi adalah segala bentuk fasilitas atau sarana yang menyediakan dukungan penting bagi kegiatan ekonomi di suatu wilayah, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal dan berkelanjutan. Infrastruktur ini melibatkan berbagai sektor yang berperan langsung dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi, serta memperlancar arus barang, jasa, dan informasi. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi suatu daerah akan sulit untuk berkembang, dan kualitas hidup masyarakat akan terbatas. Adapun kebijakan yang dilakukan di Gampong batu sumbang dalam membangun infratraktur dalam menunjang perekonomian masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu sumbang sebagai berikut:

“Kebijakan yang dilakukan dalam mendorong perekonomian masyarakat, kami selaku pemerintah gampong melakukan pembangunan jalan desa untuk memperlancar distribusi hasil tani, perbaikan jembatan kecil yang menghubungkan antar-dusun, dan fasilitas pasar desa untuk mendukung aktivitas jual beli masyarakat”.⁸²

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Kebijakan utama yang kami lakukan yaitu melaksanakan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses hasil pertanian ke pasar, pengadaan fasilitas air bersih untuk mendukung

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

kebutuhan masyarakat dan usaha, serta pembangunan irigasi sawah guna meningkatkan hasil panen”.⁸³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut sebagai berikut:

“Di Gampong Batu sumbang dalam mendorong perekonomian masyarakat yang mayoritas adalah petani dan pekebun kami melakukan pembangunan saluran irigasi, pengadaan tempat penyimpanan hasil tani (gudang desa), dan pembangunan jalan akses menuju kebun masyarakat”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Batu Sumbang berfokus pada peningkatan aksesibilitas, produktivitas, dan fasilitas pendukung untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pemerintah gampong memprioritaskan pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar serta mempermudah mobilitas masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi, meningkatkan efisiensi waktu, dan mendukung daya saing produk lokal.

Selain itu, kebijakan infrastruktur juga mencakup pembangunan saluran irigasi guna meningkatkan hasil panen serta pengadaan gudang desa sebagai tempat penyimpanan hasil tani, yang bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat keterlambatan distribusi dan menjaga kualitas hasil panen. Fasilitas pendukung lainnya, seperti pasar desa, disiapkan untuk memfasilitasi aktivitas jual-beli

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong Batu Sumbang, pada tanggal 6 November 2024.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024

masyarakat, sementara pengadaan air bersih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung kegiatan usaha kecil.

Perbaikan jembatan kecil yang menghubungkan antar-dusun juga menjadi perhatian utama untuk memperlancar konektivitas internal desa dan meningkatkan akses ke wilayah-wilayah produktif lainnya. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah Gampong Batu Sumbang dalam membangun infrastruktur sebagai penunjang utama pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kebijakan yang sudah dibuat mendapat tanggapan dari masyarakat mengenai akses jalan dan juga saluran air persawahan di Gampong Batu Sumbang. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yusuf salah satu masyarakat Gampong Batu Sumbang, sebagai berikut:

“Kebijakan terkait irigasi dan air bersih memang memberikan dampak yang baik pada awalnya, tetapi sayangnya dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan. Pembangunan fasilitas air bersih yang kami lakukan di beberapa titik memang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada awalnya. Namun, masalahnya adalah setelah beberapa bulan, fasilitas tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, irigasi sawah yang dibangun pada tahun-tahun sebelumnya juga mulai mengalami kerusakan. Sekitar 70% masyarakat Gampong Batu Sumbang adalah petani sawah, dan irigasi yang ada sebelumnya sangat membantu mereka dalam pengelolaan sawah. Tanpa irigasi yang berfungsi dengan baik, petani kesulitan dalam mengelola lahan pertanian, terutama pada musim kemarau”.⁸⁵

Hal ini juga mendapat tanggapan dari hasil Bapak Darmawi, yaitu:

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Masyarakat Gampong Batu Sumbang, pada tanggal 8 November 2024.

“Selain irigasi dan saluran persawahan, kami sebagai para pekebun juga telah merasakan manfaat dari sarana dan prasarana yang mendukung akses para petani dalam melakukan aktivitas kerja. Jalan menuju kebun kami sudah dapat diakses, namun kami menghadapi tantangan ketika hujan turun. Pada musim hujan, kami kesulitan untuk bekerja karena tanah menjadi licin dan becek”.⁸⁶

Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun kebijakan infrastruktur yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang, seperti pembangunan irigasi dan fasilitas air bersih, memberikan dampak positif pada awalnya, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Bapak Yusuf mengungkapkan bahwa fasilitas air bersih yang dibangun hanya dapat dimanfaatkan untuk waktu yang singkat, setelah itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, irigasi yang dibangun sebelumnya juga mulai mengalami kerusakan, yang berdampak pada para petani sawah, mengingat sekitar 70% masyarakat Gampong Batu Sumbang bergantung pada irigasi untuk pengelolaan sawah mereka.

Bapak Darmawi juga menambahkan bahwa selain masalah irigasi dan saluran persawahan, manfaat sarana dan prasarana untuk akses para pekebun sudah dirasakan. Jalan menuju kebun sudah dapat diakses, tetapi mereka masih menghadapi tantangan saat musim hujan. Tanah yang licin dan becek membuat aktivitas pertanian menjadi terhambat. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan yang ada sudah memberikan manfaat awal, terdapat tantangan yang perlu diperbaiki agar infrastruktur ini dapat lebih efektif mendukung kegiatan pertanian

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Darmawi selaku Masyarakat Gampong Batu Sumbang, pada tanggal 8 November 2024.

dan perekonomian masyarakat di Gampong Batu Sumbang. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi dilapangan yang disajikan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1

Irigasi Sawah, Saluran Air Bersih dan Jalan

4. Pendekatan Partisipatif

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, masyarakat dilibatkan secara aktif melalui musyawarah gampong. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Gampong Batu Sumbang, kami selalu mengedepankan pendekatan partisipatif. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah gampong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proses ini dimulai dengan musyawarah dusun, di mana setiap dusun menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hasil dari musyawarah dusun ini kemudian dibawa ke

musyawarah gampong untuk dibahas lebih lanjut dan diputuskan kebijakan yang akan dijalankan”.⁸⁷

Hal ini sejalan dengan Bapak Kase Kesejahteraan sebagai berikut:

“Langkah yang sudah diambil untuk mengatasi masalah kerusakan irigasi dan fasilitas air bersih adalah dengan mengadakan musyawarah gampong untuk membahas solusi perbaikan. Dalam musyawarah tersebut, kami mengusulkan perbaikan irigasi yang rusak dalam rencana anggaran desa tahun ini. Selain itu, kami juga mengajukan permohonan kepada pemerintah agar fasilitas air bersih dapat diperbaiki dan dipelihara secara rutin, sehingga dapat berfungsi lebih lama. Namun, kami menyadari bahwa keberhasilan perbaikan ini sangat bergantung pada anggaran yang tersedia dan dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah provinsi atau kabupaten”.⁸⁸

Selanjutnya, Bapak Jamal memberikan keterangan sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat, pemerintahan gampong melakukan musdus dan kemudian melakukan musyawarah gampong agar mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat agar mencapai masyarakat yang sejahtera. Seperti halnya, yang sampai saat ini kami mencari solusi bersama masyarakat dengan melakukan musyawarah mengenai jalan rawat beton yang belum direalisasikan di setiap dusun dan juga jalan menuju kekebun masyarakat”.⁸⁹

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Gampong Batu Sumbang melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah gampong, di mana setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah dusun yang menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, kemudian dibahas lebih lanjut untuk menentukan kebijakan yang sesuai, seperti perbaikan infrastruktur irigasi dan fasilitas air bersih yang rusak, serta solusi terkait jalan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong Batu Sumbang, pada tanggal 6 November 2024.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024

rawat beton dan jalan menuju kebun masyarakat, dengan harapan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga mendapat tanggapan dari Bapak Yusuf selaku masyarakat Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Dalam proses pengambilan kebijakan, setiap keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah gampong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proses ini dimulai dengan musyawarah dusun, di mana setiap dusun menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hasil dari musyawarah dusun ini kemudian dibawa ke musyawarah gampong untuk dibahas lebih lanjut dan diputuskan kebijakan yang akan dijalankan”.⁹⁰

5. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemerintah gampong melibatkan pemuda dan tokoh masyarakat dalam mengevaluasi program yang telah berjalan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Di Gampong Batu Sumbang, kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kami melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat. Pemuda berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program dan memberikan masukan, sementara tokoh masyarakat membantu dalam proses evaluasi dengan memberikan perspektif yang lebih luas tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Evaluasi ini dilakukan secara rutin dalam musyawarah gampong, di mana kami mendiskusikan hasil-hasil yang dicapai dan memutuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan”.

Hal ini sejalan dengan Bapak Kase Kesejahteraan sebagai berikut:

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Masyarakat Gampong Batu Sumbang, pada tanggal 8 November 2024.

“Dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan, kami sangat mengandalkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat, baik pemuda maupun tokoh-tokoh lainnya, dilibatkan untuk memberikan masukan dan mengawasi jalannya kebijakan. Kami secara rutin mengadakan musyawarah gampong untuk mendiskusikan hasil-hasil pelaksanaan program. Evaluasi yang kami lakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam setiap evaluasi, kami juga menilai apakah kebijakan tersebut sudah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat atau perlu adanya penyesuaian lebih lanjut”.⁹¹

Pemerintah Gampong Batu Sumbang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian kebijakan dengan tujuan yang diharapkan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari pemuda dan tokoh masyarakat. Pemuda berperan dalam mengawasi pelaksanaan program, sementara tokoh masyarakat memberikan perspektif mengenai dampak kebijakan terhadap masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui musyawarah gampong untuk membahas hasil-hasil yang dicapai, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada upaya menyesuaikan kebijakan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

4.2.2 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur Perspektif Kebijakan Publik Islam

Kebijakan Publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut para ilmuwan dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

Syatibi, menekankan pada pentingnya terpenuhinya pilar *maqashid shari'ah* dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin (*ulil amri*) atau pemerintah Islam.⁹² Untuk merealisasikan tujuan dalam fikih siyasyah dalam Islam maka perlu dirumuskan beberapa kaidah yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan dalam kepemimpinan Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu ber iman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*⁹³

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah wajib dan sunnah serta menjauhi larangan. Taat kepada pemimpin hanya sah jika mereka tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan kepada pemimpin tidak boleh menyelisihi ajaran Rasul, karena Rasul hanya memerintahkan ketaatan kepada Allah. Selain itu, segala perselisihan dalam agama harus dikembalikan

⁹² H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh*, edisi Revisi (Cet. Ke III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 147-148.

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena keduanya adalah pedoman yang adil untuk menyelesaikan masalah dan merupakan syarat keimanan yang benar.⁹⁴

Berdasarkan ayat tersebut pemimpin didefinisikan sebagai orang mendapatkan tanggungjawab untuk mengurus kebutuhan orang lain atau komunitas yang dipimpinnya, dalam skala luas adalah rakyat.

1. Keadilan

Dalam Hal ini kebijakan dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui kebijakan publik islam merujuk kepada prinsip-prinsip kebijakan public Islam, dimana selaku pemimpin kebijakan yang dilakukan harus bersikap adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an dalam QS. Al-Ma'idah (5:8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu ter hadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Tafsir Quraish Shihab dalam Surat al-Maidah: 8 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan kelanjutan dari pesan-pesan Ilahi yang sebelumnya, yang mengajarkan keadilan, terutama dalam perlakuan terhadap istri-istri, termasuk yang berasal dari Ahli Kitab. Setelah diperbolehkan menikahi mereka, Allah memerintahkan agar umat Islam bertakwa dan berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap istri, keluarga, atau siapapun. Ayat ini mengingatkan agar kebencian tidak mendorong ketidakadilan, karena keadilan mendekatkan pada takwa yang sempurna. Allah

⁹⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. *Tafsir al-Karim ar- Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. (Jakarta; Pustaka Sahifa, 2007), h. 110.

Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, sehingga setiap tindakan harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan perhitungan-Nya.⁹⁵

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil. Hal itu diterapkan pada hubungan antar individu, dan hubungan antar institusi atau negara.

Di Gampong Batu Sumbang, kebijakan yang mengutamakan prinsip keadilan diterapkan dengan serius dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan langsung kepada para petani, seperti pembagian bibit unggul untuk meningkatkan hasil pertanian petani. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Selain itu, pemerintah gampong juga memberikan perhatian kepada para pekebun yang tidak memiliki sawah, dengan memberikan bantuan berupa pembagian bibit sawit serta pupuk yang dapat mendukung keberlanjutan usaha petani. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang bergantung pada sektor perkebunan.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki sawah atau kebun, pemerintah Gampong Batu Sumbang tidak melupakan mereka. Sebagai bentuk perhatian dan upaya menciptakan pemerataan kesejahteraan, pemerintah gampong memberikan solusi untuk mendapatkan pemasukan bagi masyarakat melalui pembukaan desa wisata

⁹⁵ M. Quraisy Shihab. *Tafsir al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 41.

yang menyerap tenaga kerja dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat gampong Batu Sumbang.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, keadilan itu bukan hanya soal memberikan bantuan yang merata, tetapi juga tentang memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, kami memberikan bibit unggul dan pupuk kepada para petani dan pekebun yang membutuhkan. Tapi, kami juga memberikan program pelatihan dan pembukaan desa wisata kepada mereka yang tidak memiliki sawah atau kebun, agar mereka bisa mengembangkan keterampilan dan meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Dalam pandangan saya, kebijakan ini sudah cukup sesuai dengan prinsip keadilan, karena masing-masing warga mendapatkan perhatian berdasarkan kondisi mereka”.⁹⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Imam Gampong Batu Sumbang menganggap kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip keadilan, karena kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap individu di masyarakat, tanpa mendiskriminasi atau merugikan kelompok manapun.

2. Kebajikan

Kebijakan pembangunan di Gampong Batu Sumbang berlandaskan pada prinsip kebajikan yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan harmoni masyarakat. Prinsip ini mendorong berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan makmur. Dalam hal ini, pemerintah gampong menjalankan berbagai kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang, Pada Tanggal 10 November 2024.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Insan (76:8-9)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

Artinya: Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. “(Mereka berkata,) “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi rida Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu.”⁹⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan Mereka yang memberi makan orang miskin sekemampuan dan atas kesukaan terhadap makanan itu walaupun menginginkannya, anak yatim yang ditinggal mati bapaknya padahal belum tumbuh dewasa, dan para tawanan yang tidak memiliki daya apa-apa.⁹⁸

Ayat dalam Surah Al-Insan (76:8-9) mengajarkan pentingnya memberi bantuan kepada sesama dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Ayat ini menggambarkan perilaku orang-orang yang memprioritaskan kepentingan orang lain, seperti orang miskin, yatim, dan tawanan, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian.

Kebijakan yang mencerminkan prinsip kebajikan di Gampong Batu Sumbang meliputi penyediaan irigasi dan akses air bersih untuk mendukung ketahanan pangan dan kualitas hidup, pembagian pupuk guna meningkatkan kesejahteraan petani, pelaksanaan program kesehatan seperti penanganan stunting, posyandu lansia, dan pembangunan Polindes untuk melayani kelompok rentan, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah yang menjunjung keadilan dan

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 20—30*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 862.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), h. 659.

partisipasi masyarakat demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Adapun hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

"Secara prinsip, kebijakan pembangunan saluran irigasi dan air bersih yang dilakukan di Gampong Batu Sumbang memang sangat baik, karena ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan dasar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berbuat kebajikan, yang berarti memberikan manfaat kepada orang banyak, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Program air bersih dan irigasi ini sangat membantu warga, terutama para petani yang membutuhkan air untuk pertanian. Oleh karena itu, saya merasa kebijakan ini sudah mencerminkan prinsip kebajikan, yang menekankan pada kerja sama dan tanggung jawab social. Selain itu, program kesehatan seperti posyandu lansia dan penanganan stunting menunjukkan kepedulian pemerintah gampong terhadap kelompok rentan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya melindungi dan memperhatikan kesejahteraan anak-anak, orang tua, dan orang yang membutuhkan. Prinsip musyawarah yang diterapkan dalam pengambilan keputusan juga sangat penting, karena mencerminkan nilai keadilan dan memastikan bahwa setiap kebijakan membawa manfaat bagi semua warga tanpa terkecuali."⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip kebajikan. Namun, dari segi manfaat dan keberlanjutan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, kebijakan yang sudah dilakukan sudah tidak memberikan manfaat lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

“Sayangnya, saluran irigasi dan program air bersih yang dulu sangat membantu saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Saluran irigasi banyak yang tersumbat, dan beberapa titik sudah tidak bisa mengalirkan air dengan lancar. Ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama petani yang sangat bergantung pada irigasi untuk pertanian mereka. Begitu juga dengan distribusi air bersih, ada beberapa daerah yang sudah tidak

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang, Pada Tanggal 10 November 2024.

mendapatkan pasokan air dengan baik. Jadi, meskipun kebijakan ini sangat bagus pada awalnya, sekarang sudah kurang efektif.¹⁰⁰

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ini pada awalnya sesuai dengan prinsip kebajikan, keberlanjutannya perlu diperbaiki agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Perbaikan dan pemeliharaan yang lebih baik sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang.

3. Kehendak Bebas

Kebijakan dalam Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih dan berinovasi dalam kerangka syariat, mendorong inisiatif dan kreativitas tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Namun, prinsip ini juga menetapkan aturan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan orang lain. Kebijakan memberikan kebebasan kepada individu dalam kerangka syariat.

Di Gampong Batu Sumbang, kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan berbagai aspek lainnya mengedepankan prinsip kehendak bebas, di mana setiap keputusan penting terkait pembangunan atau kebijakan lainnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa. Musyawarah ini menjadi wadah bagi

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang, Pada Tanggal 10 November 2024.

masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan aspirasi mereka terkait kebijakan yang akan diambil.

Prinsip kehendak bebas dalam konteks ini tercermin dalam partisipasi masyarakat yang diberikan kebebasan untuk memilih solusi atau pendekatan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti dalam hal pembangunan fasilitas umum, pengelolaan sumber daya alam, atau program-program pemberdayaan ekonomi. Misalnya, sebelum kebijakan pembangunan saluran irigasi atau penyediaan air bersih dilaksanakan, masyarakat diajak berdiskusi dan memberikan masukan mengenai kebutuhan mereka serta tantangan yang dihadapi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Imam Gampong, diantaranya sebagai berikut:

“Kebijakan yang melibatkan musyawarah desa (Musdus) ini sangat baik dan sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dalam Islam. Dalam Islam, kita diberi kebebasan untuk berpendapat dan berinovasi, namun kebebasan itu harus tetap berada dalam koridor syariat. Musyawarah desa adalah sarana yang tepat untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan yang dibuat, baik itu terkait pembangunan, program sosial, atau kebijakan lainnya”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang, kebijakan yang melibatkan musyawarah desa (Musdus) dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dalam Islam. Musyawarah desa memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang, Pada Tanggal 10 November 2024

masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan aspirasi mereka secara bebas dalam kerangka syariat Islam. Setiap warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan dalam keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama.

Prinsip kehendak bebas ini tercermin dari kebijakan yang tidak memaksakan kehendak satu pihak saja, melainkan mengutamakan kebebasan berpendapat dan memilih yang terbaik untuk masyarakat. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah gampong, setiap suara dan pilihan dari masyarakat dihargai dan dipertimbangkan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena memberikan ruang bagi kreativitas, partisipasi, dan inisiatif masyarakat, selama tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan orang lain.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan kolektif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik harus menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan sosial, dengan pengawasan yang efektif untuk memastikan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi.

Kebijakan yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang dalam mengimplementasikan prinsip tanggung jawab dapat dilihat dari berbagai aspek, yang mencakup tanggung jawab individu maupun kolektif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Gampong

Batu Sumbang adalah pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan saluran irigasi. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengelolaannya. Dengan adanya saluran irigasi yang lebih baik dan air bersih yang terdistribusi dengan baik, masyarakat diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam merawat fasilitas ini. Namun, kebijakan ini sudah tidak berjalan lagi dengan efektif. Saluran irigasi yang dulu sangat membantu petani kini banyak yang sudah rusak dan tidak lagi mengalirkan air dengan lancar. Begitu juga dengan program air bersih yang dulu sangat bermanfaat, namun saat ini beberapa daerah di Gampong Batu Sumbang sudah tidak mendapatkan pasokan air bersih yang cukup.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan awalnya dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, pengelolaan dan pemeliharaan yang kurang optimal menyebabkan kebijakan tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan kebijakan tidak hanya terletak pada pemerintah gampong, tetapi juga pada masyarakat yang harus berperan aktif dalam merawat dan menjaga fasilitas yang telah dibangun.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh Imam Gampong Batu sumbang, sebagai berikut:

“Menurut saya kebijakan yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang sangat bagus karena fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih dan irigasi yang sangat diperlukan oleh warga,

khususnya petani. Prinsip tanggung jawab dalam Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesejahteraan bersama. Kebijakan ini pada awalnya sudah sangat tepat karena tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat Gampong Batu Sumbang. Namun, saat ini, saya sangat prihatin karena saluran irigasi dan program air bersih sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Saluran irigasi banyak yang rusak, dan beberapa daerah tidak lagi mendapat pasokan air bersih yang cukup. Meskipun kebijakan ini di awal sangat baik, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang kurang perhatian menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, menurut saya, untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab, kita harus lebih memperhatikan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang ada, serta memastikan masyarakat berperan aktif dalam merawatnya”.¹⁰²

Dari pandangan Imam Gampong Batu Sumbang, kebijakan ini pada awalnya memang sudah mencerminkan prinsip tanggung jawab dengan memberikan manfaat bagi masyarakat secara kolektif, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan irigasi. Namun, karena pengelolaan dan pemeliharaan yang kurang optimal, kebijakan ini tidak lagi berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan awal sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab, keberlanjutan kebijakan tersebut membutuhkan komitmen yang lebih besar dari semua pihak, baik pemerintah gampong maupun masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang telah dibangun.

Kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang sudah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip kebijakan publik Islam, seperti keadilan, kebajikan, dan kehendak bebas. Namun, untuk lebih mendalami kesesuaiannya dengan prinsip tanggung jawab, kebijakan ini masih membutuhkan perhatian dalam hal keberlanjutan dan manfaat serta menjaga pengelolaan yang

¹⁰² Hasil wawancara dengan Imam Gampong Batu Sumbang, Pada Tanggal 10 November 2024

lebih baik agar fasilitas yang telah dibangun tetap berfungsi optimal. Hal ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam merawat dan mempertahankan infrastruktur yang ada, serta memastikan adanya pengawasan yang efektif dari pihak terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dapat merugikan pihak lain, terutama dalam jangka panjang. Tanpa perhatian pada aspek-aspek ini, kebijakan tersebut berisiko kehilangan manfaat yang diharapkan dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.3 Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur Perspektif Kebijakan Publik Islam

Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di wilayah pedesaan. Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, namun masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Dalam perspektif kebijakan publik Islam, kebijakan pembangunan ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai syariah yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, kebajikan, kehendak bebas dan tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Islam menekankan bahwa kebijakan publik harus menciptakan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan menghindari kemudharatan.

Dampak yang timbul dari kebijakan yang dilakukan di Gampong Batu Sumbang dengan membagikan pupuk dan bibit bersubsidi kepada para petani dan pekebun, pembagian bantuan kepada masyarakat, pembangunan irigasi dan penyediaan air bersih kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Batu Sumbang. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong Batu Sumbang, sebagai berikut:

“Kami di Gampong Batu Sumbang sangat bersyukur dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan pupuk dan bibit bersubsidi kepada petani. Ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil panen mereka, terutama di sektor perkebunan dan pertanian. Sebelumnya, banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Namun, dengan adanya subsidi ini, mereka bisa mengurangi biaya produksi. Selain itu, pembangunan irigasi dan penyediaan air bersih sangat berdampak positif bagi masyarakat. Irigasi yang dibangun membantu mengalirkan air ke ladang-ladang petani yang sebelumnya sulit dijangkau air. Sedangkan penyediaan air bersih memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari warga, terutama dalam menjaga kesehatan keluarga”.¹⁰³

Adapun lanjutan wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang sebagai berikut:

“Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pembagian pupuk dan bibit bersubsidi sangat membantu meningkatkan produktivitas petani di gampong kami. Para petani kini lebih semangat mengolah lahan karena mereka merasa lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun, kami menyadari bahwa pembangunan irigasi membutuhkan perhatian khusus. Saluran irigasi yang ada sudah tidak berfungsi dengan baik. Banyak saluran yang tersumbat dan mengalami kerusakan, sehingga air tidak mengalir ke lahan pertanian. Kondisi ini sangat merugikan petani, terutama pada musim kemarau”.¹⁰⁴

Adapun hasil wawancara dengan Tuha Peut:

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah selaku Geucik gampong Batu Sumbang, pada tanggal 6 November 2024.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat selaku Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024.

“Pembangunan irigasi awalnya sangat membantu petani dalam mengairi lahan mereka. Namun, saat ini kondisinya sudah tidak produktif lagi. Banyak saluran irigasi yang rusak dan tidak diperbaiki, sehingga air tidak sampai ke ladang-ladang petani. Ini membuat hasil panen menurun karena lahan kembali kering saat musim kemarau”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Gampong Batu Sumbang, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pembagian pupuk dan bibit bersubsidi, pembagian bantuan kepada masyarakat, pembangunan irigasi, serta penyediaan air bersih, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

Kebijakan pembagian pupuk dan bibit bersubsidi sangat membantu para petani dan pekebun dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Dengan adanya subsidi, para petani dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat terkait dengan infrastruktur. Saluran irigasi yang dibangun sebelumnya kini mengalami kerusakan di beberapa titik, sehingga air tidak mengalir dengan baik ke lahan pertanian. Kondisi ini sangat merugikan petani, terutama saat musim kemarau. Selain itu, program penyediaan air bersih yang pernah dibangun juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak instalasi air bersih yang rusak dan tidak diperbaiki, sehingga masyarakat kembali kesulitan mendapatkan air bersih.

Dalam Islam, kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dianjurkan. Kebijakan yang dilakukan di

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang, Pada tanggal 6 November 2024

Gampong Batu Sumbang, pembagian pupuk dan bibit bersubsidi mencerminkan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam, di mana pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat. Namun, perbaikan irigasi dan penyediaan air bersih juga merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang harus diperhatikan, karena air adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Allah SWT juga berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik. (QS. An-Nur: 55)

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin yang adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyat akan mendapatkan ridha Allah. Dalam hal ini, kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti irigasi dan air bersih merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin yang harus dijalankan dengan baik.

Kebijakan yang dilakukan di Gampong Batu Sumbang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pangan dan air bersih. Namun, pemimpin juga harus

memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat terus berfungsi dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Perbaikan irigasi dan penyediaan air bersih merupakan bentuk *masalahah* (kemaslahatan) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk segera melakukan perbaikan agar kebijakan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur

Pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat dengan membuka peluang baru yang berkelanjutan, sehingga menciptakan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Bapak Ahmad Piah selaku Geuchik Gampong Batu Sumbang, kebijakan ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, yang didasarkan pada potensi lokal seperti sektor pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan.

Selain itu, keberlanjutan ekonomi menjadi tujuan utama dalam kebijakan ini, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam. Pemerintah Gampong Batu Sumbang bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat jangka

panjang. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Rizki Hidayat, Kase Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, yang menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan para petani dan pekebun.

Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang meliputi program kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi.

1. Kesehatan

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Batu Sumbang untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program kesehatan. Salah satunya adalah program stunting bagi balita dan ibu hamil untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak dan ibu hamil yang sehat. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ahmad Piah, program ini sangat penting untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, ada pula program posyandu untuk lansia yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan para lansia. Bapak Jamal selaku Tuha Peut Gampong Batu Sumbang menambahkan bahwa posyandu bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan, tetapi juga sebagai tempat bagi lansia untuk berkumpul dan berinteraksi.

Fasilitas kesehatan seperti polindes juga disediakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan balita. Menurut Bapak Rizki Hidayat, polindes berfungsi

untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat di Gampong Batu Sumbang.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Gampong Batu Sumbang dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini, pemerintah gampong bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit unggul bersubsidi dan pembentukan kelompok tani. Bapak Ahmad Piah menyatakan bahwa bantuan bibit unggul dan pembentukan kelompok tani sangat penting untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, pemerintah gampong juga sedang mengembangkan program kampung wisata untuk membuka peluang ekonomi baru.

3. Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Infrastruktur penunjang ekonomi di Gampong Batu Sumbang berfokus pada pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Salah satu kebijakan penting adalah pembangunan jalan usaha tani, yang bertujuan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar. Selain itu, perbaikan jembatan kecil yang menghubungkan antar-dusun dan pembangunan saluran irigasi untuk meningkatkan hasil panen juga menjadi perhatian utama pemerintah gampong.

Menurut Bapak Rizki Hidayat, pembangunan jalan desa dan usaha tani sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil tani, sementara

Bapak Ahmad Piah menambahkan bahwa pembangunan irigasi sawah juga merupakan prioritas untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, pemerintah gampong juga membangun pasar desa untuk memfasilitasi aktivitas jual beli masyarakat. Masyarakat juga merasa terbantu dengan pembangunan infrastruktur ini, terutama dalam hal distribusi hasil pertanian dan penyimpanan hasil tani. Namun, beberapa masyarakat, seperti Bapak Yusuf, menyebutkan bahwa meskipun kebijakan pembangunan infrastruktur awalnya memberikan dampak positif, pelaksanaan fasilitas air bersih dan saluran irigasi masih menghadapi beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapainya secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi di Gampong Batu Sumbang menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam sektor pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Masyarakat mengapresiasi kebijakan pemerintah gampong yang mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pemberian bantuan bibit unggul, pelatihan pertanian, pengembangan kampung wisata, serta pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi hasil tani. Namun, masyarakat juga berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi beberapa kekurangan, terutama dalam hal pemberian pupuk dan perbaikan fasilitas air bersih serta saluran irigasi. Secara keseluruhan, kebijakan ini berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Batu Sumbang.

4.3.2 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur Perspektif Kebijakan Publik Islam

1. Prinsip Keadilan

Prinsip pertama dalam kebijakan publik Islam adalah keadilan, yang mencakup distribusi kekayaan secara merata di masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya yang lemah. Pada Gampong Batu Sumbang, kebijakan yang diterapkan, seperti pemberian bantuan kepada petani dan pembagian bibit unggul serta akses ke sumber daya ekonomi lainnya, mencerminkan upaya untuk mengimplementasikan prinsip keadilan ini. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan distribusi yang adil dan merata serta pemberantasan ketidakadilan ekonomi seperti riba dan eksploitasi. Secara lebih rinci, kebijakan pemberian bantuan langsung kepada kelompok yang membutuhkan ini memastikan bahwa masyarakat yang lebih lemah mendapatkan hak mereka. Pembangunan desa wisata yang juga dijalankan di Gampong Batu Sumbang memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam sektor pertanian. Ini merupakan bentuk kebijakan yang memberikan akses setara terhadap peluang ekonomi, yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat.

Namun, meskipun kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun, seperti saluran irigasi dan pembagian air bersih. Hal ini menunjukkan pentingnya

penegakan hukum untuk memastikan keberlanjutan kebijakan serta menghindari ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

2. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan mengutamakan kesejahteraan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Kebijakan berbasis kebajikan memprioritaskan kesejahteraan sosial dengan mendorong filantropi, seperti zakat, infak, dan sedekah untuk membantu golongan yang kurang mampu. Di Gampong Batu Sumbang, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial terlihat jelas pada program pemberian irigasi dan air bersih yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, masyarakat di Gampong Batu Sumbang juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang memperkuat ikatan sosial dan kerja sama antarwarga.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas dalam kebijakan publik Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk berinovasi dan berkreasi dalam kerangka syariat, yang mendorong inisiatif pribadi dan kreativitas tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Di Gampong Batu Sumbang, ini tercermin dalam kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah desa untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat ini memberikan kebebasan kepada individu untuk menyampaikan pendapat dan berinovasi dalam kerangka yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam kebijakan publik Islam mengharuskan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, dengan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pembangunan, baik dari individu maupun kolektif. Hal ini terlihat pada peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan proyek-proyek pembangunan, seperti pemeliharaan irigasi, serta pengawasan terhadap distribusi air bersih. Penerapan prinsip tanggung jawab juga mencakup pengaturan yang memastikan bahwa kebijakan tidak merusak lingkungan atau merugikan generasi mendatang.

Kebijakan publik yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang telah mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam kebijakan publik Islam, seperti keadilan, kebajikan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Kebijakan yang mengutamakan distribusi kekayaan yang adil, memperhatikan kesejahteraan sosial, dan memberikan kebebasan bagi individu dalam berinovasi telah membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Meskipun demikian, tantangan dalam hal pemeliharaan dan keberlanjutan kebijakan masih perlu diperhatikan, serta pentingnya penegakan hukum untuk menghindari ketidakadilan ekonomi dan penyalahgunaan kebebasan. Dengan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gampong Batu Sumbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahbudi dalam bukunya, para ilmuwan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali

dan Imam Asy-Syatibi, yang menekankan pentingnya maqashid syari'ah (tujuan syariat) dalam kebijakan publik untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam teori ini, kebijakan publik tidak hanya dilihat dari sisi keberhasilan administratif atau ekonomi semata, tetapi juga dari perspektif bagaimana kebijakan tersebut menjaga kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat secara holistik.¹⁰⁶

4.3.3 Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Gampong Batu Sumbang Kec. Simpang Jernih, Kab. Aceh Timur Perspektif Kebijakan Publik Islam

Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di wilayah pedesaan. Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Dalam perspektif kebijakan publik Islam, kebijakan pembangunan ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai syariah yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, kebajikan, kehendak bebas, dan tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinan. Islam menekankan bahwa kebijakan publik harus menciptakan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan menghindari kemudharatan.

¹⁰⁶ Muhammad Syahbudi, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Cet. Ke-1. (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), h. 49.

Dampak kebijakan yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang meliputi pembagian pupuk dan bibit bersubsidi kepada petani dan pekebun, pembagian bantuan sosial kepada masyarakat, pembangunan irigasi, serta penyediaan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Piah, selaku Geuchik Gampong Batu Sumbang, beliau menyatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam sektor pertanian. Subsidi pupuk dan bibit meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Pembangunan irigasi dan penyediaan air bersih juga memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari warga.

Namun, hasil wawancara dengan Bapak Rizky Hidayat, selaku Kepala Kesejahteraan Gampong Batu Sumbang, mengungkapkan bahwa meskipun subsidi pupuk dan bibit telah meningkatkan produktivitas petani, pembangunan irigasi masih membutuhkan perhatian khusus. Banyak saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan tersumbat, sehingga tidak berfungsi optimal, terutama saat musim kemarau. Hal serupa disampaikan oleh perwakilan Tuha Peut, yang menyoroti bahwa irigasi yang awalnya sangat membantu kini mengalami degradasi dan belum mendapatkan perbaikan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, kebijakan pembangunan ekonomi di Gampong Batu Sumbang memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Subsidi pupuk dan bibit membantu petani meningkatkan produktivitas, tetapi permasalahan infrastruktur seperti irigasi yang rusak dan instalasi air bersih yang tidak berfungsi menjadi kendala yang perlu segera diatasi.

Dalam Islam, kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dianjurkan. Program subsidi pertanian mencerminkan semangat ta'awun (tolong-menolong), di mana pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tetap berfungsi agar manfaatnya berkelanjutan. Allah SWT berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik." (QS. An-Nur: 55).

Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin yang adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyat akan mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus dirancang dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Perbaikan irigasi dan penyediaan air bersih merupakan bentuk masalah (kemaslahatan) yang sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga pemerintah desa harus memastikan keberlanjutan infrastruktur agar manfaatnya tetap dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan potensi lokal, seperti hasil alam berupa padi, karet, sawit, dan tanaman pangan, telah didorong melalui pengusulan bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi, serta pelatihan bagi petani. Selain itu, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas pasar, turut memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan produktivitas. Namun, meskipun kebijakan ini telah memberikan manfaat awal, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan infrastruktur. Fasilitas air bersih dan irigasi yang dibangun mengalami kerusakan, menghambat kegiatan pertanian, terutama pada musim kemarau. Selain itu, akses jalan yang baik menuju kebun juga terhambat pada musim hujan, mengurangi efektivitas kerja petani dan pekebun.
2. Kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, telah mencerminkan prinsip-prinsip kebijakan publik Islam, seperti keadilan, kebajikan, kehendak

bebas, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip keadilan tercermin dalam bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip kebajikan terlihat melalui penyediaan air bersih dan saluran irigasi, melaksanakan program stunting, posyandu lansia dan fasilitas polindes, prinsip kehendak bebas diwujudkan dalam musyawarah desa yang memberikan ruang partisipasi, dan prinsip tanggung jawab tercermin dalam upaya pemerintah gampong memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, untuk memastikan kebijakan ini bermanfaat berkelanjutan, diperlukan pengelolaan, pemeliharaan, dan partisipasi masyarakat yang lebih baik.

3. Dampak kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, dalam perspektif kebijakan publik Islam menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama di sektor pertanian. Pembagian pupuk dan bibit bersubsidi serta pembangunan irigasi dan penyediaan air bersih telah membantu meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan terkait kerusakan infrastruktur, seperti saluran irigasi dan instalasi air bersih, memerlukan perhatian serius agar manfaat kebijakan dapat bertahan dalam jangka panjang.

5.2 Saran

1. Mengingat kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan infrastruktur, sangat penting untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Dengan melibatkan warga dalam pelatihan pemeliharaan

infrastruktur seperti irigasi dan fasilitas air bersih, mereka dapat lebih mandiri dalam merawat fasilitas yang ada tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar.

2. Agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam tahap pemeliharaan dan evaluasi infrastruktur. Musyawarah gampong yang lebih rutin dan melibatkan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an, Sri Maryani, and Agus Eka. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas." *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 3.1 (2022).
- Adib, Masruhan. Penerapan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Diss. IAIN Purwokerto, 2021.
- Alfiaturrahman, Pislawati. "Perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan." *Valuta* 2.2 (2016).
- Alfiaturrahman, Pislawati. "Perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan." *Valuta* 2.2 (2016).
- Al-Mizan," Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016).
- Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta. 2016).
- Bawano, Icuk Rangga dan Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019).
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2016).
- Fajar Santoso dan Bhenu Artha, "Pengaruh Ekspor Terhadap Gross Domestic Product (Studi Kasus Pada Negara-Negara Islam," *Jurnal Ekonomi Manaemen dan Sosial* 4, no. 2 (2021).
- Frisdiantara, Christea dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*, (Malang: Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan Malang, 2016).
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).
- Hayat, Slamet Hidayat Turohman, and Yaqub Cikusin. "Strategi pembangunan sumber daya manusia berbasis pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa." *Jurnal Transformasi Administrasi* 8.2 (2018).

- Kharil Nur Laili Husna, Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis Berbasis Agrobisnis Di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Krisnawati. "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2.2 (2016).
- Kurniyati, Yuni. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- M. Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 2. (Jakarta: Airlangga University Press, 2020).
- Maghfiroh, Durrotul, Dwi Risma Deviyanti, and Indra Suyoto Kurniawan. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 4.3 (2019).
- Mahfud Sholihin, Et. Al., *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2020).
- Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mirna. "Pengembangan Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bone." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2019).
- Mujiwardhani, Alfian, Heru Wibowo, and Iman Tri Mulya. "Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 1.2 (2019).
- Mulyani, Endang. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017).
- Nawawi, Ismail. *Public Policy* (Surabaya: ITS Press, 2014).
- Patarai, Muhammad Idris. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. (Makassar: De La Macca, 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Purnamasari, Sulfi. *Ekonomi Pembangunan* (Banten: Unpam Press, 2019).

- Rapanna, Patta dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*. (Makassar: CV Sah Media, 2017).
- Siwu, Hanly Fendy Djohar. "Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18.6 (2019).
- Statistik, Badan Pusat. "Badan pusat statistik." *Badan Pusat Statistik* (2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2014).
- Sukarniati, Lestari.,dkk, *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Tamtangan di Negara Berkembang)* (Yogyakarta: UAD Press, 2021).
- Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014).
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 2015).
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses* (Yogyakarta: Medpress, 2017).
- Yulianus Nardin "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes, 2019.
- Yusuf Hariyoko. "Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16.2 (2021).